



# Tidak Cermat dalam Adminisitrasi

**PONTIANAK** - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menyatakan administrasi yang tidak cermat membuat pengelolaan aset selalu menjadi persoalan bagi pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan Laporan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan pemeriksaan BPK.

“Seringkali tidak cermat dan perobmatika ini tidak hanya di Kalbar, tapi se-Indonesia. Bahkan Papua malah lebih parah lagi,” kata Dodi saat menerima melaksanakannya kunjungan kerja Komite IV DPRD RI dalam rangka Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 2017 di Balai Petitih Gubernur Kalbar, Senin (14/5/2018).

Dodi mencontohkan dalam tanah yang sudah memperoleh hak pengelolaan. Kemudian tanah itu di-HGB kan kepada pejabat pemerintah daerah yang sudah pensiun. Ternyata tanah itu bisa beralih kepemilikan lagi ke pihak lain.

“Dalam kondisi itu, diperlukan pengadministrasian yang cermat. Yang diperiksa pemilik aset itu Pemprov, sementara operasional aset itu ada dihuni pihak ketiga, yakni pensiunan pejabat,”

jelas dia.

Dodi menambahkan permasalahan itu timbul ketika pengalihan aset pemprov ke pihak ketiga melalui pelelangan umum.

“Masalahnya dalam pelelangan umum itu bukan pensiun pejabat yang sudah menghuni aset mendapatinya, melainkan pihak lain. Gambaran ini terjadi di seluruh Indonesia,” kata dia.

Dodi meminta agar inspektorat bekerja cepat sehingga peralihan aset itu tidak menjadi masalah kemudian hari. “Alternatif lain tidak ada, aturannya seperti itu harus dilakukan pelelangan umum. Sekarang inventarisir dulu

sampai berapa kali pindah, nanti seperti apa pemindahan kepemilikan,” pinta Dodi.

Sementara itu Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni mengatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 di Kalbar ada sembilan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Pemprov Kalbar, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Pontianak.

“Enam masih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Singkawang, Sambas, Melawi, Kayong Utara, Kapuas Hulu dan Bengkayang,” kata Siska. (mse)